

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan merupakan salah satu pokok utama suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan harus mampu memberi dampak kepada peningkatan taraf hidup masyarakat masing-masing negara. Peningkatan taraf hidup tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Todaro (2006) menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi

Akan tetapi proses pembangunan tidak selalu berjalan sebagaimana yang direncanakan terutama terkait dengan upaya-upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan menjadi fenomena di sejumlah daerah. Ketimpangan pendapatan adalah keadaan dimana terjadinya perbedaan distribusi pendapatan yang diterima antar kelompok/individu dalam suatu daerah. Sehingga hanya kelompok tertentu saja yang menikmati hasil dari pembangunan yang dicapai, sedangkan kelompok lainnya tidak atau hampir tidak merasakan peningkatan kesejahteraan (Kamaluddin, 1999). Sedangkan ketimpangan pembangunan adalah keadaan yang terjadi karena faktor geografis yang terlalu luas, tidak stabilnya politik, faktor historis daerah tersebut, pengelolaan administratif yang kurang baik, faktor ekonomi dan sosial (Murty, 2000).

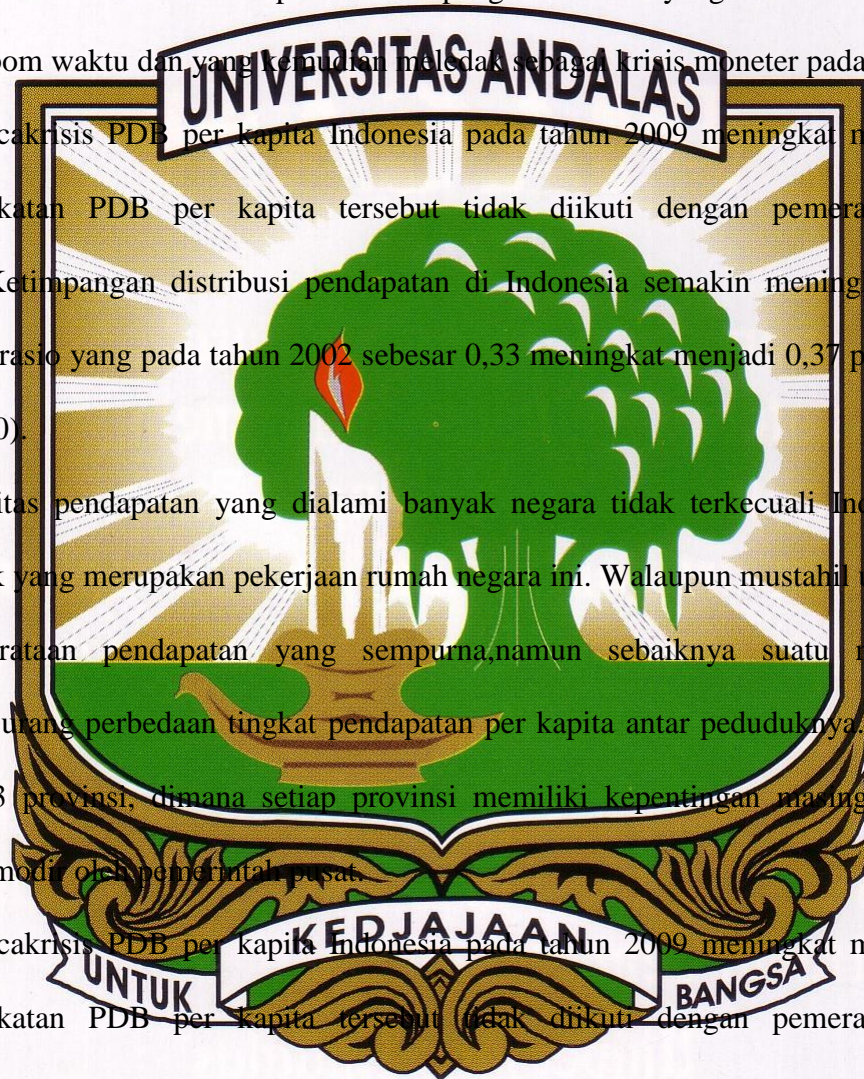


Kuncoro(2010) menggambarkan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Indonesia sebelum dan setelah krisis moneter pada tahun 1997 dengan beberapa zaman. Ketimpangan ekonomi yang terjadi pada zaman penjajahan tidak separah ketimpangan yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Hal ini dikarenakan adanya konglomerasi yang terjadi mulai tahun 1987–1994 telah menciptakan ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Hal inilah yang menciptakan bom waktu dan yang kemudian meledak sebagai krisis moneter pada tahun 1997.

Erapascakrisis PDB per kapita Indonesia pada tahun 2009 meningkat menjadi \$2.590, tetapi peningkatan PDB per kapita tersebut tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia semakin meningkat, ini terlihat pada nilai gni rasio yang pada tahun 2002 sebesar 0,33 meningkat menjadi 0,37 pada tahun 2009 (Kuncoro,2010).

Disparitas pendapatan yang dialami banyak negara tidak terkecuali Indonesia, adalah masalah klasik yang merupakan pekerjaan rumah negara ini. Walaupun mustahil untuk mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sempurna, namun sebaiknya suatu negara mampu memperkecil jurang perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar penduduknya. Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi, dimana setiap provinsi memiliki kepentingan masing-masing harus mampu diakomodir oleh pemerintah pusat.

Erapascakrisis PDB per kapita Indonesia pada tahun 2009 meningkat menjadi \$2.590, tetapi peningkatan PDB per kapita tersebut tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia semakin meningkat, ini terlihat pada nilai gni rasio yang pada tahun 2002 sebesar 0,33 meningkat menjadi 0,37 pada tahun 2009 (Kuncoro,2010).



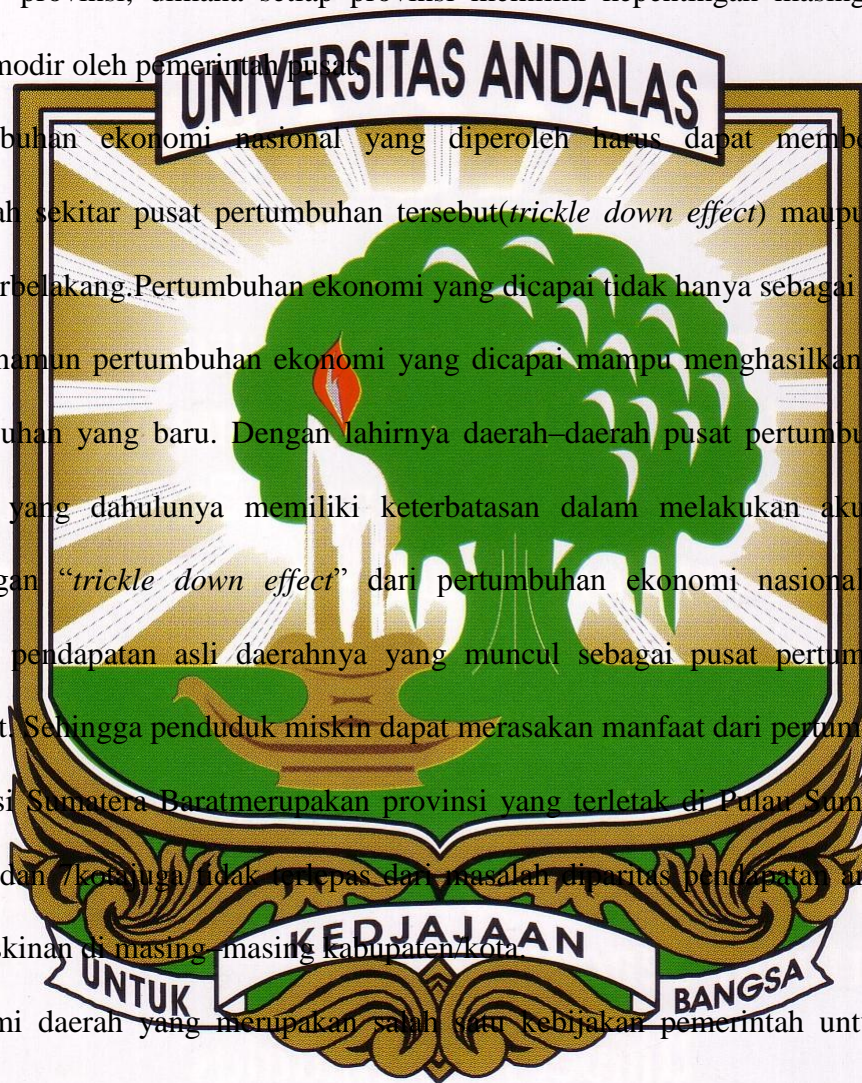
Disparitas pendapatan yang dialami banyak negara tidak terkecuali Indonesia, adalah masalah klasik yang merupakan pekerjaan rumah negara ini. Walaupun mustahil untuk mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sempurna, namun sebaiknya suatu negara mampu memperkecil jurang perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar penduduknya. Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi, dimana setiap provinsi memiliki kepentingan masing-masing harus mampu diakomodir oleh pemerintah pusat.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang diperoleh harus dapat memberikan dampak terhadap daerah sekitar pusat pertumbuhan tersebut (*trickle down effect*) maupun bagi daerah-daerah yang terbelakang. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya sebagai prestasi dalam statistik saja, namun pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu menghasilkan daerah-daerah pusat pertumbuhan yang baru. Dengan lahirnya daerah-daerah pusat pertumbuhan yang baru maka daerah yang dahulunya memiliki keterbatasan dalam melakukan akumulasi modal, sekarang dengan "*trickle down effect*" dari pertumbuhan ekonomi nasional akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya yang muncul sebagai pusat pertumbuhan baru di negara tersebut. Sehingga penduduk miskin dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut.

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, memiliki 12 kabupaten dan kota yang tidak terlepas dari masalah disparitas pendapatan antar daerah dan masalah kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota.

Otonomi daerah yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat disparitas antar daerah di Indonesia berdampak kepada bertambahnya jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita
Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah)
Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat periode 2010-2015



kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kep. Mentawai	18.811,83	27.351,16	29.567,41	32.593,39	36 082,49	39 684,41
Pesisir Selatan	10.737,81	15.186,74	16.767,76	18.542,74	20 541,85	22 071,54
Solok	15.198,08	19.471,60	21.481,02	23.718,83	26 025,83	27 842,28
Sijunjung	15.043,31	22.638,17	24.570,87	26.725,53	29 608,85	31 880,71
Tanah Datar	15.999,26	19.848,56	21.661,46	23.781,76	26 631,36	28 640,31
Padang Pariaman	16.053,05	23.858,31	26.717,17	30.614,10	35 072,28	38 959,30
Agam	14.458,46	21.848,04	24.134,84	26.698,21	29 424,85	31 613,36
Lima Puluh Kota	18.059,82	21.817,07	23.840,24	26.352,43	28 953,59	31 378,70
Pasaman	12.964,53	16.886,13	18.329,53	20.001,84	22 323,97	23 809,92
Solok Selatan	9.750,02	18.758,11	20.480,63	22.308,00	24 786,48	26 436,69
Dharmasraya	13.984,04	26.031,43	28.073,42	30.530,40	33 073,47	34 595,58
Pasaman Barat	17.360,78	20.794,35	22.512,78	24.500,51	26 842,94	28 518,84
Padang	29.462,18	34.361,87	37.965,04	41.782,15	46 422,45	49 528,70
Solok	18.451,74	31.624,24	34.689,56	38.082,49	42 136,80	44 860,39
Sawahlunto	19.721,05	32.905,20	35.992,95	39.021,18	42 664,42	45 273,47
Padang Panjang	19.860,11	36.026,15	38.990,28	42.297,39	46 757,90	49 678,57
Bukittinggi	19.647,83	35.342,63	38.663,62	42.434,84	46 709,40	49 888,93
Payakumbuh	16.114,18	24.772,92	27.272,32	29.949,18	33 257,69	35 566,30
Pariaman	19.976,93	30.405,80	33.153,91	36.571,00	40 752,09	43 364,83
Sumatera Barat	17.926,06	24.056,68	26.286,16	28.994,48	32 132,24	34 411,18

sumber :

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat pada umumnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan kegiatan perekonomian di Sumatera Barat semakin berkembang. Kemajuan perekonomian masing-masing kabupaten/kota tentunya akan meningkatkan PDRB per kapita Sumatera Barat yang dimana menurut data yang diperoleh dari BPS Sumatera Barat, yaitu pada tahun 2010 PDRB per kapita Sumatera Barat sebesar Rp. 17.926,06 dan meningkat menjadi Rp. 34.411,18 pada tahun 2015. Namun disamping itu terdapat perbedaan PDRB per kapita antara kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Dimana pada tahun 2015 Kota Bukittinggi memiliki PDRB per kapita tertinggi sebesar Rp. 49.888,93 sedangkan kabupaten Pesisir Selatan memiliki PDRB per kapita terendah sebesar Rp. 22.071,54. Dengan adanya perbedaan PDRB per kapita yang terjadi di kota dan kabupaten

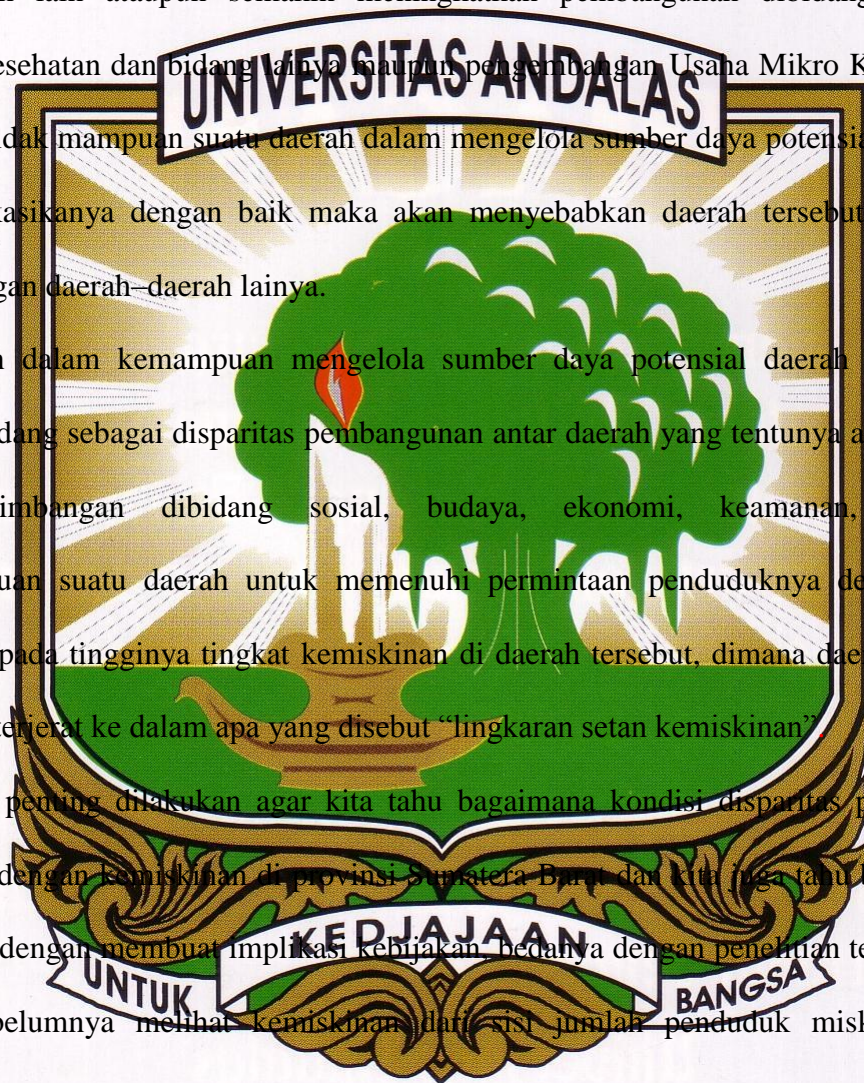


yang ada di Sumatera Barat ini menunjukkan adanya disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain ataupun semakin meningkatkan pembangunan dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya maupun pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).Ketidak mampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya potensial yang dimiliki dan mengalokasikanya dengan baik maka akan menyebabkan daerah tersebut akan semakin tertinggal dengan daerah-daerah lainnya.

Ketertinggalan dalam kemampuan mengelola sumber daya potensial daerah masing-masing tersebut dipandang sebagai disparitas pembangunan antar daerah yang tentunya akan berdampak kepada keseimbangan dibidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan lainnya. Ketidakmampuan suatu daerah untuk memenuhi permintaan penduduknya dengan baik akan berdampak kepada tingginya tingkat kemiskinan di daerah tersebut, dimana daerah terbelakang tersebut akan terjat ke dalam apa yang disebut “lingkaran setan kemiskinan”

Penelitian ini penting dilakukan agar kita tahu bagaimana kondisi disparitas pendapatan dan hubungannya dengan kemiskinan di provinsi Sumatera Barat dan kita juga tahu bagaimana cara mengatasinya dengan membuat implikasi kebijakan. bedanya dengan penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya melihat kemiskinan dari sisi jumlah penduduk miskin, sedangkan penelitian ini dilihat dari sisi tingkat kemiskinan dan studi kasusnya mempunyai perbedaan daerah.



Berdasarkan uraian di atas, penulis menganalisa bagaimana hubungan tingkat disparitas pendapatan dengan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat, dengan judul: **“Analisis Hubungan Disparitas Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar dalam penelitian adalah:

Bagaimana hubungan disparitas pendapatan dengan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat?

Bagaimana kecenderungan disparitas pendapatan di Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana hubungan disparitas pendapatan dengan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.

Untuk mengetahui sejauh mana kecenderungan disparitas pendapatan di Sumatera Barat.

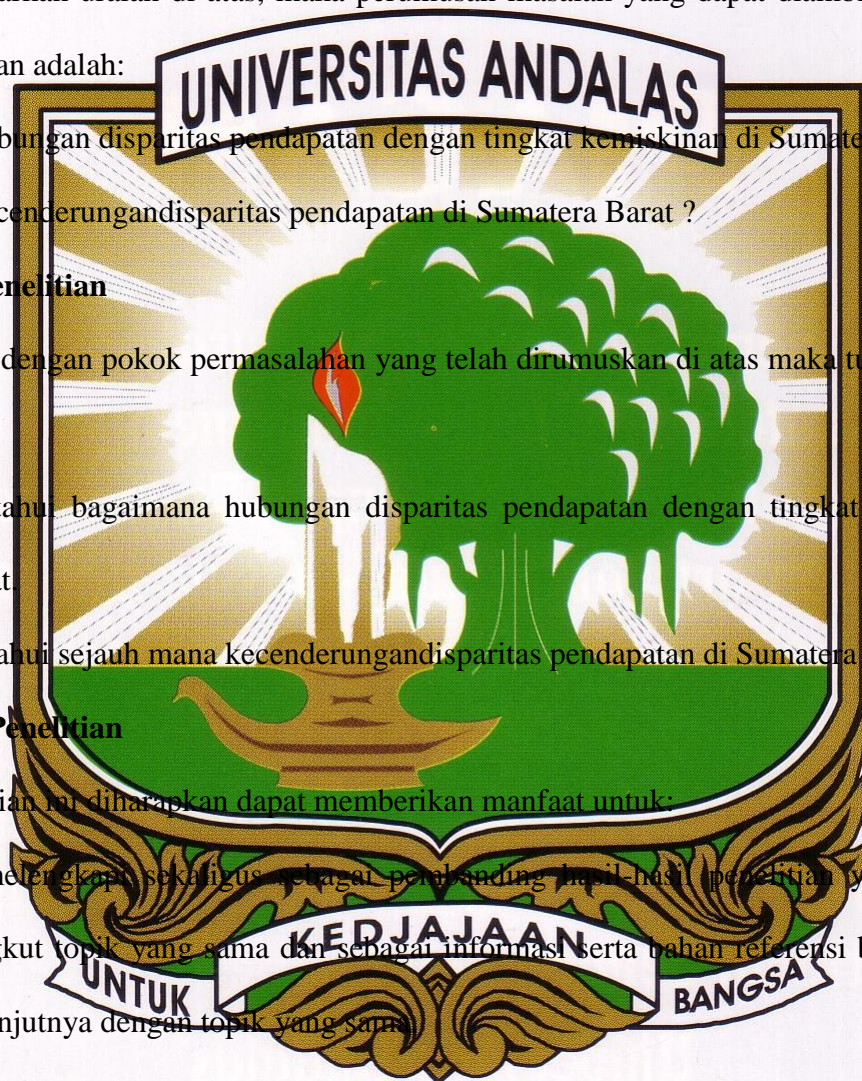
1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

Menambah, melengkapi sekaligus sebagai perbandingan hasil-hasil penelitian yang sudah ada yang menyangkut topik yang sama dan sebagai informasi serta bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi.

Sebagai bahan tambahan bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan terkait dengan disparitas pendapatan di Sumatera Barat.



Sebagai tambahan wawasan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana pengaruh disparitas pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.

